

BAB IV

Proses Organisasi Muslim di Australia Melakukan Sertifikasi Halal

Bab ini akan membahas mengenai proses organisasi Muslim yang berada di Australia melakukan sertifikasi halal yang diawali dengan penjelasan asosiasi yang dilakukan umat Muslim Australia. Dilanjutkan dengan penjelasan kerjasama yang dilakukan umat Muslim Australia dengan pemerintah Australia mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan sertifikasi halal. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan kebijakan pemerintah Australia terkait adanya sertifikasi halal.

A. Asosiasi Organisasi Muslim Australia Mengenai Sertifikasi Halal

Australia adalah negara yang kaya akan sumber alam, terisolasi, berpenduduk jarang dan sangat bergantung pada perdagangan dan akses-akses di pasar-pasar internasional yang jauh. Sejak masa koloni, Australia telah menjadi pemasok bahan-bahan pertambangan, produk-produk pertanian, serta barang-barang industri bagi pasar Inggris. Perdagangan luar negeri ini dapat dipertimbangkan sebagai kepentingan nasional Australia yang utama. (Hamid, Sistem Politik Australia, 1999)

Australia adalah negara pengekspor daging terbesar di dunia dan merupakan negara pelopor produksi halal di dunia. Australia merupakan negara yang egalitarian dimana pemerintah memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memeluk agama yang ingin mereka anut dan mereka juga berhak untuk tidak memeluk agama. Namun hal ini berbeda dengan produksi halal di Australia dimana Australia yang merupakan pelopor produksi halal di dunia dan pemerintah ikut berperan didalamnya. Aturan halal secara legal ditujukan untuk tujuan ekspor ke negara-negara yang mayoritas Muslim. Pemerintah Australia sangat peduli dengan pelaksanaan halal dan memiliki kepentingan untuk bekerjasama dengan komunitas Muslim di Australia dalam rangka bisnis halal. Lembaga resmi pemerintah yang turut berperan dalam industri

daging dan susu di Australia adalah Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) berada dibawah Departement Agriculture, Fisheries, and Forestry (DAFF) (repository.ipb.ac.id, hal. 30)

Kata “halal” dan “haram” merupakan istilah al-Qur’an dan ini digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagian besar yang berhubungan dengan halal dan haram adalah makanan dan minuman. (Ali, 2016)

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakan dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang. (Ali, 2016)

Sebagai seorang Muslim mengkonsumsi makanan halal merupakan sebuah kewajiban. Di Australia Muslim merupakan agama yang minoritas sehingga sering kali seorang Muslim kesulitan dalam mendapatkan makanan halal. kesulitan ini bermula pada aspek sertifikat halal. Hal ini dikarenakan banyak rumah potong hewan yang ingin mendapatkan daging halal hanya dengan memperkerjakan orang Islam tanpa pemahaman sesuai syariat Islam. (Natashi, 2016)

Jumlah penduduk Muslim di Australia hanya sekitar 2,2 persen, ini artinya bahwa 98 persen lainnya adalah non-Muslim. Umat Muslim mengalami kesulitan yang cukup menjadi perhatian yaitu mendapatkan makanan dan minuman halal. Bermula dari kesulitan umat Muslim ini, Australian Federation Islamic Council (AFIC) bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya, mendirikan lembaga penerbit sertifikasi halal, baik untuk rumah makan (restaurant) maupun rumah pemotongan hewan (abatoir). (republika.co.id, 2009)

Di Australia, terdapat beberapa lembaga penerbit halal, diantaranya AFIC, Otoritas Sertifikat Halal Australia, Al-Iman Islamic Society, Australian Halal Food Service, Adelaide Mosque Islamic Society of South Australia, Islamic Cordinating Council of Victoria (ICCV), Perth Mosque Incorporated, Islamic Association of Katanning, dan Geraldton. (republika.co.id, 2009)

Saat ini di Australia memiliki beberapa lembaga penerbit sertifikasi halal, meskipun jumlahnya tidak banyak. Penerbit tersebut antara lain AFIC (Association Federation of Islamic Council), Al-Iman Islamic Society, Islamic Cordinating Council of Victoria (ICCV), Otoritas Sertifikat Halal Australia, Australian Halal Food Service, Adelaide Mosque Islamic Society of South Australia, Perth Mosque Incorporated, Islamic Association of Katanning, dan Geraldton.



Gambar 4.1 Mengenai sertifikasi halal di Australia.

Diantara penerbit sertifikasi halal yang ada di Australia, terdapat penerbit yang telah diakui oleh beberapa organisasi Islam di dunia. Diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Termasuk, beberapa rumah pemotongan hewan, seperti Adelaide Islamic Mosque Society, Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia, ICCV, dan Perth Mosque Inc. Lembaga-lembaga inilah yang memberikan sertifikasi halal pada rumah-rumah makan di Australia dan merupakan badan

independen dari Islamic Center Australia sendiri, dan pemerintah tidak campur tangan dalam masalah ini.

Sertifikat halal adalah sertifikat pemerintah yang mencakup sertifikasi daging halal yang dilakukan oleh Organisasi Islam dan juga oleh Sekertaris 1 (agriculture.gov.au, 2009). Sertifikat halal berarti isi dan pembuatan produk telah disahkan oleh otoritas keagamaan yang sesuai dengan hukum syariah Islam yang berkaitan dengan makanan. Ada beberapa lembaga Islam di Australia yang bersaing dalam layanan sertifikasi halal. (fettayleh.com)

Produk yang bersertifikat halal di Australia dapat berasal dari dua sumber; produk dalam negeri yang diproduksi secara lokal dan disertifikasi oleh bisnis lokal, atau produk impor yang telah disertifikasi diluar negeri. (fettayleh.com)

Pada tahun 2009 Program Halal Pemerintah Australia *AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) Meat Notice* memberikan sebuah pedoman untuk persiapan, identifikasi, penyimpanan dan sertifikasi ekspor daging halal merah dan produk daging merah. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada semua perusahaan untuk melakukan penyembelihan ternak, persiapan, identifikasi, pengolahan, penyimpanan, segregasi dan sertifikasi daging halal dan produk daging merah yang selanjutnya akan disebut dengan daging halal untuk diekspor ke semua negara pengimpor.

Pemberitahuan mengenai hal ini berlaku untuk semua perusahaan yang terdaftar dalam memproduksi, memproses dan menyimpan daging merah dan produk daging halal untuk di ekspor. Hal ini juga berlaku bagi Organisasi Islam yang melakukan pengawasan dan sertifikasi daging halal untuk di ekspor.

Dalam pendirian prosedur halal sebuah perusahaan Approved Islamic Organization (AIO) dan AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) memainkan bagian integral dalam operasi penyembelihan dan pengelolaan halal untuk di ekspor ke Australia.

Export Control (Meat and Meat Product) Orders (ECMMPOs) berlaku dan sudah mulai berjalan sejak Juli 2005.

Pesanan ini mengharuskan setiap perusahaan memiliki prosedur yang terdokumentasi artinya harus relevan dengan jenis pendirian yang sudah ditetapkan untuk melakukan persiapan, pembelian, identifikasi, pengolahan, pemisahan dan sertifikasi daging halal. prosedur ini merupakan bagian dari pendirian Approved Arrangement (AA). Approved Arrangements (AA) merupakan panduan bagi semua perusahaan yang terdaftar untuk memenuhi aturan seperti Good Hygienic Practices, keamanan Pangan, Wholesomeness dan persyaratan negara pengimpor. Lembaga sertifikasi halal yang akan berperan untuk memeriksa persyaratan negara pengimpor terkait sertifikasi halal.

AA harus mengidentifikasi Approved Islamic Organization (AIO) yang bertanggung jawab atas pelatihan dan pengawasan kegiatan pembantaian perempuan dan akan secara rutin memverifikasi pengaturan halal pada saat pendirian.

Pesanan terhadap produk halal meminta Approved Islamic Organization (AIO) yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan sertifikasi halal juga harus memiliki AA. AIO bertugas untuk bertanggung jawab atas pengawasan keagamaan, dan penyediaan sertifikasi untuk produksi daging halal untuk di ekspor. Untuk disetujui, Organisasi Islam harus memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan dalam pesanan.

Approved Islamic Organization merupakan sebuah organisasi yang disetujui oleh sekretaris atau delegasi sesuai dengan persyaratan yang terperinci dalam ECMMP. AIO bertujuan untuk mengawasi produksi dan sertifikasi daging halal untuk di ekspor ke negara-negara lain. Daftar AIO dipelihara dan diterbitkan secara berkala oleh AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service). (agriculture.gov.au, 2009)

AQIS menyediakan 3 element infrastruktur untuk kegiatan ekspor daging halal yaitu seorang dokter hewan pemerintah, kualitas asuransi dan lembaga sertifikasi halal. semua keputusan terkait dengan kehalalan atau persyaratan tertentu dari negara pengimpor diputuskan oleh lembaga sertifikasi atau organisasi Islam yang melakukan sertifikasi. Pemerintah Australia tidak campur tangan dalam ranah syariah ini. (repository.ipb.ac.id)

Tiap organisasi atau lembaga yang berperan pada aktifitas halal di Australia memiliki prosedur kerja sebagai berikut;

1. Approved Islamic Organization (AIO) adalah Islamic Organization (IO) yang terpilih berdasarkan persyaratan detail dalam Export Control (Meat and Meat) Produk Orders (ECMMPO) 2005 untuk kepentingan pengawasan produksi dan sertifikasi daging halal. IO juga harus diakui oleh masjid lokal setempat, otoritas negara pengimpor, memberikan data yang detail terhadap pelaksanaan pelatihan serta pengawasan terhadap penjagal Muslim.
2. Perusahaan melakukan prosedur adanya jaminan produk halal dengan cara memastikan dan bertanggung jawab atas hewan yang disembelih berdasarkan syariat Islam. kondisi ini dibuktikan dengan adanya label setelah memenuhi persyaratan halal.
3. AQIS melakukan pemeriksaan berdasarkan prosedur National Establishment Verification System (NEVS) untuk penyembelihan, identifikasi, proses, penyimpanan, pemisahan, dan sertifikasi halal. (repository.ipb.ac.id)

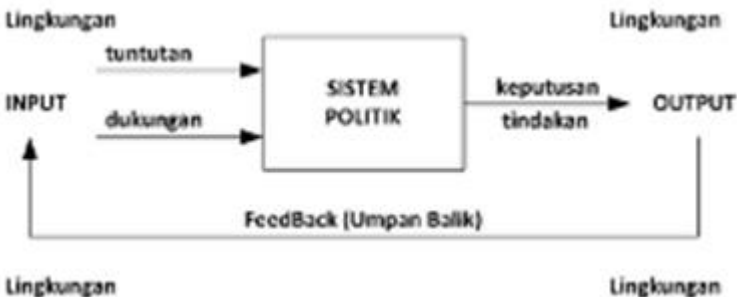
Dalam asosiasi yang dilakukan organisasi Muslim di Australia terutama yang disebutkan bahwa Approved Islamic Organization telah memiliki banyak peran dalam melakukan sertifikasi halal. Hal ini menjadi sebuah strategi yang dimiliki AIO untuk mencapai tujuannya yakni mendapatkan serifikasi halal.

Dalam tesis ini penulis menggunakan 2 teori untuk menghubungkan antara kasus yang dibicarakan dengan teori yang bersangkutan. Teori yang pertama merupakan teori strategi politik. Menurut Peter Schroeder Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita- cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalkannya program deregulasi, privatisasi atau

desentralisasi. Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan.

Dalam hal ini AIO (Approved Islamic Organization) melakukan strategi yakni melakukan pengawasan produksi untuk daging yang akan di sertifikasi lalu di ekspor ke negara-negara lain. Ini merupakan sebuah strategi AIO untuk merealisasikan bahwa makanan yang akan dikirim ke negara yang meminta ekspor daging dari Australia telah terjamin kehalalannya karena telah dilakukan sebuah proses yakni identifikasi, pengelolaan, penyimpanan dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentunya AIO menginginkan bahwa kehalalan yang dimaksudkan tetap sesuai dengan syariat Islam, bagaimana melakukan penyembelihan terhadap hewan, penyimpanan yang tidak bercampur dengan makanan lain yang tidak tergolong makanan halal dan lain sebagainya.

Teori kedua yang digunakan oleh penulis adalah teori sistem politik. pengertian sistem politik menurut David Easton adalah serangkaian proses yang terdiri dari banyak bagian-bagian saling berkaitan yang menjalankan kebijakan atau keputusan yang dikuatkan oleh kekuasaan yang sah dan mengikat masyarakat. Sistem Politik terdiri atas alokasi nilai-nilai dimana pengalokasian nilai tersebut bersifat paksaan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. Fungsi sistem politik tidak terlepas dari fungsi input dan fungsi output dari sistem politik itu sendiri.



Dalam pembahasan mengenai asosiasi yang dilakukan umat Muslim Australia dalam mendapatkan sertifikasi halal merupakan sebuah input dalam fungsi sistem politik. Fungsi *input* dapat diartikan sebagai suatu yang menunjukkan berbagai efektifitas yang memungkinkan suatu sistem berjalan. Menurut Mochtar Masoed dalam bukunya perbandingan sistem politik, ada dua jenis pokok input-input suatu sistem politik: yaitu tuntutan dan dukungan. Input-input inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diperoleh oleh sistem itu. Pada umumnya input dalam suatu sistem politik dimanifestasikan kedalam sebuah dukungan (Support) dan tuntutan (demand) input merupakan bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik itu sendiri. (Masoed, 1993)

Dalam hal ini AIO yang melakukan pengawasan terhadap makanan yang akan disertifikasi baik yang akan dikeluarkan untuk pasar domestik ataupun yang akan di ekspor ke luar negeri. Dalam melakukan asosiasi ini AIO tentu mendapat dukungan lingkungan seperti untuk melakukan pengawasan AIO yang terpilih harus melakukan berbagai prosedur yang salah satunya harus mendapatkan izin dari beberapa mesjid. Selain itu Approved Islamic Organization (AIO) merupakan sebuah organisasi yang disetujui oleh sekretaris atau delegasi sesuai dengan persyaratan yang terperinci dalam ECMMP.

B. Kerjasama Organisasi Muslim Australia dengan Pemerintah Mengenai Label Halal

Ada beberapa lembaga sertifikasi halal yang beroperasi di Australia. Departemen Pertanian memiliki daftar organisasi Islam yang memiliki Approved Arrangement (AA) untuk mengesahkan daging halal untuk kembali diekspor ke berbagai negara. Saat ini tercatat 22 organisasi yang beroperasi di Australia pada bulan September 2015.

Peraturan pemerintah Australia mengenai sertifikasi halal hanya berlaku untuk para produsen yang menyediakan daging untuk di ekspor ke berbagai negara. Sementara sebagian

besar daging ini mungkin hanya dijual dan berakhir di pasar domestik, penyedia sertifikasi yang hanya melayani pasar Australia tidak mematuhi peraturan pemerintah manapun, artinya bahwa tidak ada peraturan pemerintah mengenai daging yang akan dijual di pasar domestik. (fettayleh.com)

Ada tiga lembaga yang terlibat dalam urusan halal di Australia terkait dengan penyediaan daging dan produk olahan daging untuk selanjutnya di ekspor ke berbagai negara. Pertama adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penyediaan daging dan produk olahan daging halal, kedua adalah Approved Islamic Organization (AIO) yaitu lembaga sertifikasi halal yang telah disetujui oleh pemerintah Australia berdasarkan persetujuan dari negara tujuan ekspor, dan ketiga adalah pemerintah yang berada dibawah Department Agriculture Fisheries and Forestry (DAFF) atau tepatnya AQIS. (repository.ipb.ac.id)

Ada beberapa kewajiban mendirikan sertifikasi halal diantaranya :

1. AA (approved Arrangements) memegang kekuasaan dibawah ECMMPO yang menangani produksi daging halal
2. Daging halal yang disiapkan harus diidentifikasi dengan adanya cap resmi halal Pemerintah Australia (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2 dari jadwal 6 ECMMPO) pada daging atau pada kemasannya.
3. Dalam kategori Approved Islamic Organization (AIO) yang akan menangani sertifikasi halal adalah AIO yang disetujui oleh Pemerintah Australia sesuai dengan persyaratan ECMMPO harus bertanggung jawab penuh atas aspek religius produksi daging halal.
4. Dalam kategori AQIS
 - a. Menyetujui AA antara AQIS dan AIO dan AQIS dan Perusahaan
 - b. Akan memeriksa dan memverifikasi peraturan pendirian semua aspek non-religius dari produksi daging halal

- c. Penerbitan sertifikat halal untuk daging halal yang akan di ekspor (sebagai bergabungnya dalam organisasi Islam / fungsi AQIS) dengan AQIS yang membatasi pengesahannya terhadap aspek-aspek non-religius (agriculture.gov.au, 2009)

Peraturan pemerintah tidak konsisten mengenai pemantauan, pengelolaan dan ekspor. Selain itu kurangnya peraturan dan konsistensi antara sesama sertifikasi lokal. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah besar bagi produsen makanan dan pemasok. Sementara itu beberapa penyedia sertifikasi sebagian dari organisasi Islam yang lebih besar seperti Australian Federation of Islamic Council (AFIC) atau Supreme Islamic Council of HALAL Meat in Australia (SICHMA), yang lain adalah bisnis yang berdiri sendiri yang menyediakan layanan sertifikasi lokal dengan biaya tertentu.

Konsumen non-Muslim di Australia beranggapan bahwa makanan halal sedikit berbeda dengan makanan lain yang tersedia. Ini hanya masalah apakah makanan itu halal atau tidak dan keinginan seseorang yang memiliki tingkat religius yang tinggi untuk mengonsumsi makanan yang halal. sertifikasi halal merupakan sebuah perbaikan yang bisa dilakukan ini salah satu cara agar Muslim puas dalam mengonsumsi makanan yang mereka anggap halal. (fettayleh.com)

Sertifikasi makanan halal di Australia saat ini menjadi topik diskusi yang banyak diperdebatkan oleh masyarakat. Hal ini bermula dari kurangnya konsistensi dan transparansi khususnya di pasar domestik. Hal ini diperparah oleh seorang politisi Jacqui Lambie (Senator, Tas) yang mengancam untuk memperlihatkan tagihan senator pribadi untuk menutup apa yang dia klaim terkait “legal loopholes” bahwa; “dapat memungkinkan pembiayaan teroris dan musuh-musuh Australia melalui uang label halal”. (fettayleh.com)

Untuk pelaksanaan penyembelihan dalam kategori halal hanya seorang penyembelih Muslim yang bisa melakukan prosedur pemotongan untuk produk halal. ini adalah sebuah tanggung jawab Muslim sebagai penyembelih hewan yang

kompeten untuk dapat mengidentifikasi bangkai itu halal atau tidak halal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, khususnya halal sesuai dengan syariat Islam. (agriculture.gov.au, 2009)

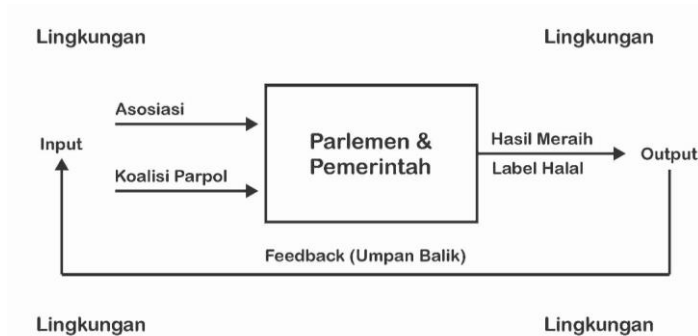
Program halal merupakan program yang tidak boleh diubah dalam situasi apapun sesuai dengan perjanjian yang sudah tertulis sebelumnya dan harus adanya persetujuan dari AIO dan ATM (Area Technical Manager). (agriculture.gov.au, 2009)

Perusahaan yang akan memproduksi daging halal atau produk olahan daging halal harus memiliki izin secara resmi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan yang diberikan pemerintah merupakan hal yang disampaikan dalam Approved Arrangement (AA). Daging halal yang disiapkan harus terlebih dulu diidentifikasi melalui pemeriksaan dengan keberadaan label halal (*halal stamp*) resmi yang diberikan oleh pemerintah yang tertera pada kemasan produk tersebut. (repository.ipb.ac.id)

Label halal merupakan sebuah perangko resmi pemerintah sebagaimana yang sudah didefinisikan pada bagian 2 dari daftar ECMMPO dan sesuatu yang sudah terkontrol dan akuntabel dalam pedoman AA. Prosedur label halal harus didokumentasikan dan dioperasikan didalam perusahaan yang terdaftar, hal ini untuk memastikan bahwa hanya daging halal yang diidentifikasi sesuai dengan bagian 2 dari daftar ECMMPO.

Perangko halal harus diterapkan pada label halal, label karamel atau label karton sebelum produk dikeluarkan dari tempat yang terdaftar dimana hewan tersebut disembelih atau dagingnya dibungkus. (agriculture.gov.au, 2009)

Dalam pembahasan mengenai kerjasama yang dilakukan umat Muslim di Australia dengan pemerintah Australia mengenai label halal, hal ini merupakan sebuah koalisi antara AIO dengan pemerintah, dimana terdapat dalam teori yang dijelaskan pada tesis ini terkait sistem politik yang dari sistem inputnya merupakan sebuah dukungan dari pemerintah.



Hal ini terjadi pada kewajiban untuk menetapkan sertifikasi halal dimana setiap hal yang dilakukan oleh AIO terlebih harus disetujui oleh pemerintah. Hal ini terdapat pada poin *kedua* bahwa “Daging halal yang disiapkan harus diidentifikasi dengan adanya cap resmi halal Pemerintah Australia (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2 dari daftar 6 ECMMPPO) pada daging atau pada kemasannya.” Dan point *ketiga* Dalam kategori Approved Islamic Organization (AIO) yang akan menangani sertifikasi halal adalah AIO yang disetujui oleh Pemerintah Australia sesuai dengan persyaratan ECMMPPO harus bertanggung jawab penuh atas aspek religius produksi daging halal.

C. Kebijakan Pemerintah Australia Mengenai Sertifikasi Halal

C.1 Diplomasi Perdagangan Australia Mengenai Halal

Perekonomian Australia pada tahun 2011 menunjukkan hasil dari penguatan dengan tingkat pertumbuhan yang cukup drastis, terjadi peningkatan sebesar 2,5% dibandingkan dengan tahun 2010. Terjadinya peningkatan perekonomian Australia juga didukung oleh berbagai perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang terus menerus dilakukan, serta perbaikan transportasi. Terutama ekspor perdagangan Australia yang terlihat nampak perubahannya dari tahun

sebelumnya yang mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonominya. (tabloiddiplomasi.org, 2012)

Selama lebih dari 200 tahun Australia memproduksi daging merah. Industri ternak dan daging di Australia telah berkembang secara pesat baik dalam segi dinamis maupun progresif. Para produsen dan pengolah daging Australia telah bekerja dengan baik sehingga menimbulkan citra baik Australia di mata dunia dalam menghasilkan daging sapi dan daging domba berkualitas tertinggi di dunia.

Dilihat dari sejarah yang ada terkait dengan pengalaman Australia dalam mengekspor daging secara ekstensif, industri ternak Australia fokus pada pemenuhan spesifikasi pelanggan guna untuk menyesuaikan produksi dan pengemasan demi memenuhi kebutuhan konsumen yang tercatat lebih dari 120 negara di dunia yang meminta produksi daging ke Australia. (loveaustralianbeefandlamb.com) Dari beberapa negara yang produksi daging dari Australia diantaranya juga merupakan negara Muslim yang memproduksi daging halal di Australia, seperti Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, dan lain sebagainya.

Australia merupakan sebuah negara produksi ternak daging terbesar di dunia. Hal ini menjadikan Australia harus memenuhi permintaan produsen. Dengan adanya daging ekspor yang di konsumsi oleh negara Muslim, menjadikan Australia harus memiliki sertifikasi halal terhadap produk konsumsinya, hal ini dikarenakan permintaan yang diajukan oleh negara Muslim itu sendiri. Ini menjadi sebuah strategi diplomasi perdagangan Australia agar produk yang mereka hasilkan bisa dinikmati oleh negara Muslim. Karena sebagian ekspor daging Australia merupakan daging yang akan di konsumsi oleh negara-negara Muslim.

Sertifikasi halal di Australia berhasil meningkatkan nilai ekspor makanan hingga mencapai angka \$13 miliar pada setiap tahunnya. Proses sertifikasi halal di Australia merupakan sebuah proses yang sangat

transparan. Dalam usaha untuk menetapkan suatu produk akan menjadi halal tidak dilakukan untuk bertujuan memperoleh keuntungan atau sebagai usaha yang komersial. (Afif, 2015)

C.2 Proses Sertifikasi Halal oleh Pemerintah dan Organisasi Muslim Australia

Kegiatan ekspor daging dari Australia ke berbagai negara merupakan kegiatan G to G (government to government) sehingga setiap keputusan atau kebijakan negara pengimpor harus disampaikan ke lembaga sertifikasi halal di Australia melalui pemerintah Australia. (repository.ipb.ac.id)

Pemerintah Australia tidak campur tangan mengenai hal yang berhubungan dengan syariah yaitu tentang semua keputusan yang terkait dengan kehalalan atau persyaratan tertentu dari negara pengimpor. Hal-hal tersebut sudah menjadi keputusan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi atau organisasi Islam yang melakukan sertifikasi halal.

Pemerintah Australia melakukan pemeriksaan ke 3 elemen yang terkait dengan kegiatan ekspor daging halal setiap 6 bulan sekali. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap 3 unsur tersebut dilakukan secara terpisah. Sementara lembaga sertifikasi melakukan pengecekan ke RPH minimal dilakukan 3 bulan sekali atau tergantung dengan masalah yang terjadi di RPH.

Pemerintah Australia memiliki program Australian Government Authorised Halal Program (AGAHP) yang merupakan salah satu bagian dari program AQIS. Program tersebut semacam petunjuk untuk melakukan persiapan, identifikasi, penyimpanan dan sertifikasi untuk ekspor halal daging dan produk olahan daging. Hal ini serupa dengan tujuan AQIS. (repository.ipb.ac.id)

Seperti proses sertifikasi lainnya, sertifikasi halal mengikuti serangkaian langkah yang luas. Hal ini meliputi:

1. Produsen atau manufaktur makanan yang relevan berlaku untuk organisasi sertifikasi yang relevan (misalnya, Halal Australia). Ini biasanya melibatkan penyediaan informasi rinci tentang bahan baku, bahan aditif, dan proses pembuatannya.
2. Pemeriksaan lokasi pabrik kemudian dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dengan tepat atas nama organisasi sertifikasi untuk menentukan apakah semua persyaratan yang relevan dipenuhi secara konsisten, dan harus adanya laporan atas pemeriksaan lokasi ini. Apabila ada hal yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan produsen mungkin diminta untuk mengubah proses pembuatan atau bahan-bahan pangannya, atau untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait rantai pasokan mereka.
3. Kesepakatan sertifikasi kemudian disimpulkan antara pemohon dan badan sertifikasi, dan akreditasi atau sertifikasi Halal diberikan untuk jangka waktu tertentu. (Murphy, 2016)

Aturan halal di Australia hanya dilakukan untuk kepentingan ekspor ke negara-negara Muslim, artinya bahwa pengawasan untuk kehalalan di Australia tidak dilakukan terhadap peredaran makanan halal didalam negeri atau pasar domestik. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaharui dan menyetujui lembaga sertifikasi halal dalam bentuk Approved Islamic Organization (AIO) untuk kepentingan ekspor daging halal. (repository.ipb.ac.id)

Cara kerja yang terjadi pada setiap permintaan atau pesanan atas daging halal memerlukan AIO yang terdaftar. AIO bertanggung jawab terhadap bidang supervisi keagamaan, ketentuan sertifikasi untuk

produksi daging halal yang ditujukan untuk kepentingan ekspor ke berbagai negara. (repository.ipb.ac.id)

Pengawasan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah penggunaan *halal stamp* atau label halal. label halal sebagai item yang terkontrol dan bertanggung jawab. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh AIO diartikan sebagai bagian dari dokumen negara selain dokumen lainnya. Dokumen tersebut akan dilampirkan mengikuti setiap produk yang diekspor ke negara tujuan. (repository.ipb.ac.id)

Pada tahun 2015 komite melakukan penyelidikan dan melaporkan atas pihak ketiga sertifikasi pangan. Sebagai bagian dari proses tersebut, isu yang berhubungan mengenai sertifikasi halal diperiksa. Atas adanya hubungan dengan sertifikasi halal tersebut maka komite membuat rekomendasi sebagai berikut;

1. Melalui departement pertanian pemerintah mempertimbangkan pemantauan dan tata tertib sertifikasi daging halal untuk di ekspor. Dalam hal ini pemerintah menjadi satu-satunya penandatanganan sertifikat halal oleh pemerintah.
2. Melalui forum bilateral dan multilateral pemerintah mempromosikan penerimaan yang lebih besar dari sistem sertifikasi halal yang dipimpin oleh “whole-of-country”
3. Pemerintah mempertimbangkan mengenai persyaratan sertifikasi barang halal di pasar domestik sesuai dengan standar yang disepakati dalam ekspor.
4. Industri sertifikasi Halal mempertimbangkan untuk membentuk satu otoritas sertifikasi Halal dan satu merek daging terdaftar bersertifikat nasional
5. Pengolahan daging yang dilakukan dengan benar dan memberi label produk yang bersumber dari hewan yang disembelih

sesuai dengan syariat Islam. (Murphy, 2016)

Banyak sekali perdebatan mengenai sertifikasi halal. Terutama hal yang berkaitan dengan pembiayaan sebuah makanan mendapatkan sertifikasi halal. Biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal sangat bervariasi hal ini tergantung pada produk, organisasi, darimana sertifikasi itu didapatkan, dan diterjunkan kemana makanan yang diberikan sertifikasi, apakah untuk keperluan ekspor atau hanya dalam ranah doomestik. Namun sering kali biaya yang dikeluarkan sederhana. (Murphy, 2016)

Untuk manufaktur dalam skala besar, sertifikasi dalam konteks untuk dipasarkan melalui media periklanan dan distribusi secara keseleruhan jumlahnya sedikit, jika ada hal tersebut akan berdampak pada harga suatu produk. Senate Economics References Committee (komite) mencatat bahwa bukti laporan sertifikasi makanan pada tahun 2015 tidak menghasilkan kenaikan harga pangan. (Murphy, 2016)

Dana yang diperoleh dari penghasilan sertifikasi halal dapat digunakan untuk berbagai tujuan diluar pembayaran biaya bisnis, bisa digunakan untuk gaji, pajak dan kegiatan organisasi. Dana ini juga bisa termasuk menyediakan dana untuk berbagai amal untuk masyarakat. Komite mencatat, dalam laporan pihak ketiga sertifikasi pangan pada tahun 2015 “bukti menunjukkan bahwa tidak ada kaitanlan langsung antara sertifikasi halal di Australia dengan pendanaan terorisme”

Dalam pembahasan kebijakan pemerintah Australia mengenai label halal merupakan perluasan dari teori yang telah digunakan oleh penulis dalam tesis ini. Penulis menggunakan teori sistem politik dimana didalam teori tersebut terdapat fungsi output didalamnya yang merupakan sebuah tujuan atau hasil, dalam hal ini hasil tersebut merupakan hasil memperoleh sertifikasi

halal yang berbentuk kebijakan pemerintah Australia mengenai label halal ini.

Pembuatan peraturan dan kebijakan merupakan salah satu fungsi *output* dalam sistem politik. Ada hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya adapun badan yang membuat peraturan atau undang-undang sebagai wujud kebijakan adalah badan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan sebuah fungsi (Simbolon, 2008). Menurut Easton *Output* terdiri dari keputusan dan tindakan, dari *output* ini muncul yang bernama *Feedback* (umpan balik) yang dampaknya kembali dirasakan di *Input*. Yang dimaksudkan disini adalah apakah keputusan dan tindakan itu sesuai dengan tuntunan dan dukungan yang berasal dari *Input*. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis. (Darry, 2013)

Dalam sistem *output* ini pemerintah Australia merupakan sebuah pengambil keputusan dan ini merupakan wujud kebijakan dan umpan balik dari *input* yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Dimana hasil dari *output* ini bahwa kebijakan pemerintah yakni :

1. Pemerintah Australia memiliki program AGAHP (*Australian Government Authorised Halal Program*) yang merupakan salah satu dari bagian program AQIS.
2. Pemerintah Australia tidak campur tangan mengenai permasalahan syariah seperti dalam proses penyembelihannya. Pemerintah hanya bertanggung jawab untuk mengesahkan barang yang menjadi barang permintaan dari negara ekspor bahwa barang tersebut halal. Hal ini sudah diserahkan kepada AIO yang menangani kehalalan suatu produk.

3. Pemerintah Australia melakukan pemeriksaan ke 3 elemen yang terkait dengan kegiatan ekspor daging halal setiap 6 bulan sekali.
4. Pemerintah bertanggung jawab atas stamp halal terhadap suatu produk. Dimana harus ada *stamp halal* pada setiap kemasan atau pada makanan itu sendiri.
5. Pemerintah hanya bertanggung jawab atas kehalalan yang di produksi untuk produk yang akan di ekspor, ini berarti bahwa setiap barang produksi yang beredar di pasar domestik pemerintah tidak campur tangan.